

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera mengalami penurunan signifikan, dari 43,8% pada tahun 2011 menjadi 34,47% pada tahun 2022. Namun, terdapat variasi yang cukup besar dalam kemandirian keuangan antarprovinsi. Pada tahun 2011, kemandirian keuangan daerah tertinggi adalah 43,8%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 33,45%. Provinsi Aceh memiliki kemandirian keuangan terendah, yaitu hanya sebesar 15,14% dari tahun 2011 hingga 2022, sedangkan Provinsi Sumatera Utara mencatatkan kemandirian keuangan tertinggi sebesar 50,74%.
2. Hasil regresi data panel yang diterapkan dengan model Efek Tetap mengindikasikan bahwa kedua variabel independen, yaitu kemandirian keuangan daerah (KKD) dan belanja modal (BM), secara bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah (KKD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sementara belanja modal (BM) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Mengingat adanya penurunan rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi-provinsi di Sumatera, disarankan untuk merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat melibatkan diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Peningkatan kemandirian keuangan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mendukung pembangunan manusia.

2. Mengingat hasil regresi data panel yang menunjukkan bahwa belanja modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan belanja modal. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Selain itu, perlu pemantauan yang cermat terhadap implementasi dan dampak proyek belanja modal untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya dalam meningkatkan IPM.